

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Perkembangan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi

Untuk mengetahui perkembangan rasio kemandirian daerah di kabupaten/kota

Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1 Perkembangan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/ Kota Provinsi Jambi Tahun 2017-2022 (Persen)

Kabupaten/Kota	Rasio Kemandirian Daerah						Rata-rata
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Kab. Kerinci	7,14	6,69	6,61	6,79	5,64	3,18	6,01
Perkembangan (%)	-	-6,25	-1,18	2,60	-16,87	-43,59	-13,06
Kab. Merangin	6,48	6,69	7,04	7,32	7,84	7,94	7,22
Perkembangan (%)	-	3,24	5,15	4,01	7,15	1,23	4,16
Kab. Sarolangun	7,21	9,69	7,15	6,07	5,56	5,22	6,82
Perkembangan (%)	-	34,43	-26,26	-15,09	-8,35	-6,08	-4,27
Kab. Batanghari	7,50	8,24	6,93	8,71	11,04	8,46	8,48
Perkembangan (%)	-	9,79	-15,81	25,55	26,85	-23,38	4,60
Kab. Muaro Jambi	6,42	6,85	6,70	7,01	7,98	8,02	7,16
Perkembangan (%)	-	6,61	-2,18	4,72	13,76	0,51	4,68
Kab. Tanjung Jabung Barat	7,10	4,54	4,51	4,72	7,02	4,67	5,43
Perkembangan (%)	-	-36,13	-0,61	4,61	48,72	-33,38	-3,36
Kab. Tanjung Jabung Timur	7,68	7,36	7,32	8,13	7,69	7,84	7,67
Perkembangan (%)	-	-4,06	-0,59	11,07	-5,35	1,85	0,58
Kab. Tebo	6,74	6,92	7,19	7,23	7,96	6,73	7,13
Perkembangan (%)	-	2,72	3,87	0,48	10,14	-15,42	0,36
Kab. Bungo	14,30	10,61	10,40	9,90	15,22	10,27	11,78
Perkembangan (%)	-	-25,79	-2,00	-4,73	53,71	-32,54	-2,27
Kota Jambi	26,48	20,86	23,15	21,93	23,28	26,18	23,65
Perkembangan (%)	-	-21,23	10,99	-5,26	6,13	12,49	0,62
Kota Sungai Penuh	4,58	4,70	4,24	3,88	7,60	8,53	5,59
Perkembangan (%)	-	2,68	-9,82	-8,55	95,91	12,34	18,51
Rata-Rata	9,24	8,47	8,29	8,33	9,71	8,82	8,81
Perkembangan (%)	-	-8,34	-2,06	0,49	16,53	-9,15	-0,51

Sumber : Badan Pusat Statistik Jambi 2024

Berdasarkan tabel 5.1 dapat dilihat bahwa setiap wilayah memiliki rasio kemandirian yang berbeda-beda. Untuk rata-rata rasio kemandirian daerah di kabupaten/kota Provinsi Jambi selama tahun 2017-2022 rata-rata sebesar 8,81 persen yang menunjukkan bahwa rasio kemandirian daerah di kabupaten/kota Provinsi Jambi selama tahun 2017-2022 kategorinya adalah rendah sekali. Hal ini dikarenakan Kabupaten/Kota mungkin sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat atau provinsi untuk membiayai kegiatan operasional dan pembangunan daerah. Untuk perkembangan rasio kemandirian daerah di kabupaten/kota Provinsi Jambi selama tahun 2017-2022 mengalami perkembangan yang berfluktuasi dengan rata-rata rasio kemandirian daerah sebesar -0,51 persen.

Rasio kemandirian tertinggi yaitu di wilayah Kota Jambi dengan rasio kemandirian sebesar 23,65 persen namun angka rasio ini masih pada kategori rendah. Hal ini dikarenakan Kota Jambi berhasil dalam diversifikasi sumber pendapatannya. Dengan memiliki beragam sumber pendapatan seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan aset daerah, dan lain-lain, kota ini tidak terlalu bergantung pada satu sumber pendapatan saja. Efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah dapat membantu Kota Jambi untuk mengoptimalkan pendapatan yang dihasilkan dari setiap sumber pendapatan, serta mengurangi pemborosan dan penyalahgunaan anggaran. Kota Jambi memiliki potensi pajak dan retribusi daerah yang besar dibanding kabupaten/kota lainnya. Sementara itu rasio kemandirian terendah terjadi pada Kota Sungai Penuh dengan rasio kemandirian sebesar 5,59 persen dengan kategori sangat rendah. Rendahnya rasio kemandirian di Kota Sungai Penuh dikarenakan Kota Sungai

Penuh merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Kerinci dan baru berkembang. Kota Sungai Penuh sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat atau provinsi untuk membiayai kegiatan operasional dan pembangunan daerahnya. Ketergantungan yang tinggi pada dana transfer dapat mengurangi kemandirian keuangan daerah. Potensi pajak di wilayah Kota Sungai Penuh masih sangat sedikit karena wilayah Kota Sungai Penuh merupakan wilayah terkecil yang ada di Provinsi Jambi. Kurangnya efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah dapat menyebabkan rendahnya pendapatan yang dihasilkan dari setiap sumber pendapatan. Jika pengelolaan keuangan tidak efisien, maka potensi pendapatan daerah tidak dapat dimaksimalkan.

Selanjutnya untuk rata-rata perkembangan rasio kemandirian di kabupaten/kota tertinggi terjadi di Kota Sungai Penuh yaitu sebesar 5,59 persen. Hal ini dikarenakan Kebijakan pemerintah daerah yang pro-bisnis, inovatif, dan mendukung investasi serta pertumbuhan ekonomi dapat memberikan dorongan positif terhadap pendapatan daerah. Sedangkan perkembangan rasio kemandirian di kabupaten/kota terendah terjadi di Kabupaten Kerinci yaitu sebesar -13,06 persen. Hal ini dikarenakan Kabupaten Kerinci memiliki ketergantungan yang tinggi pada sumber daya luar, baik itu dari pemerintah pusat, provinsi, atau sumber daya lainnya. Ini dapat menghambat kemampuan kabupaten untuk mengembangkan sumber daya dan potensi lokalnya secara mandiri.

5.2 Perkembangan Rasio efektivitas pendapatan di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi

Untuk mengetahui perkembangan Rasio efektivitas pendapatan daerah di kabupaten/kota Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.2 Perkembangan Rasio efektivitas pendapatan Kabupaten/ Kota Provinsi Jambi Tahun 2017-2022 (Persen)

Kabupaten/Kota	Rasio efektivitas pendapatan						Rata-rata
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Kab. Kerinci	104,66	103,54	97,87	87,97	97,91	104,78	99,46
Perkembangan (%)	-	-1,07	-5,48	-10,11	11,30	7,01	0,33
Kab. Merangin	102,04	100,10	100,75	93,37	100,62	101,79	99,78
Perkembangan (%)	-	-1,90	0,65	-7,32	7,77	1,16	0,07
Kab. Sarolangun	101,69	104,60	101,61	91,67	97,96	102,25	99,97
Perkembangan (%)	-	2,86	-2,85	-9,79	6,86	4,38	0,29
Kab. Batanghari	104,69	96,27	95,26	81,39	102,31	93,18	95,52
Perkembangan (%)	-	-8,04	-1,05	-14,55	25,69	-8,92	-1,38
Kab. Muaro Jambi	102,62	106,13	101,32	87,21	103,75	101,30	100,39
Perkembangan (%)	-	3,42	-4,53	-13,93	18,97	-2,36	0,31
Kab. Tanjung Jabung Barat	112,48	100,75	102,62	88,25	105,67	103,12	102,15
Perkembangan (%)	-	-10,42	1,85	-14,00	19,74	-2,41	-1,05
Kab. Tanjung Jabung Timur	109,26	112,20	106,25	94,64	134,73	129,07	114,36
Perkembangan (%)	-	2,69	-5,30	-10,92	42,35	-4,20	4,92
Kab. Tebo	100,37	106,07	102,23	92,72	112,43	102,51	102,72
Perkembangan (%)	-	5,68	-3,63	-9,30	21,26	-8,82	1,04
Kab. Bungo	107,03	101,23	97,91	69,00	86,60	118,46	96,71
Perkembangan (%)	-	-5,42	-3,29	-29,53	25,51	36,79	4,81
Kota Jambi	102,73	99,81	102,38	92,91	99,86	98,69	99,40
Perkembangan (%)	-	-2,84	2,57	-9,24	7,47	-1,17	-0,64
Kota Sungai Penuh	98,85	101,83	99,37	92,06	101,42	102,98	99,42
Perkembangan (%)	-	3,01	-2,41	-7,36	10,17	1,55	0,99
Total	104,22	102,96	100,69	88,29	103,93	105,29	100,90
Perkembangan (%)	-	-1,21	-2,21	-12,31	17,72	1,30	0,66

Sumber : Badan Pusat Statistik Jambi 2024

Berdasarkan tabel 5.2 dapat dilihat bahwa setiap wilayah memiliki Rasio efektivitas pendapatan yang berbeda-beda. Untuk rata-rata Rasio efektivitas pendapatan di kabupaten/kota Provinsi Jambi selama tahun 2017-2022 rata-rata sebesar 100,9 persen yang menunjukkan bahwa Rasio efektivitas pendapatan daerah di kabupaten/kota Provinsi Jambi selama tahun 2017-2022 kategorinya adalah sangat efektif. Untuk perkembangan Rasio efektivitas pendapatan daerah di kabupaten/kota Provinsi Jambi selama tahun 2017-2022 mengalami perkembangan yang berfluktuasi dengan rata-rata Rasio efektivitas pendapatan sebesar 0,66 persen.

Rasio efektivitas pendapatan tertinggi yaitu di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Rasio efektivitas pendapatan sebesar 114,36 persen dengan katogri sangat efektif. Hal ini dikarenakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam 2 tahun terakhir yaitu tahun 2021 dan tahun 2022 realisasinya pendapatan daerahnya sangat besar dibanding targetnya. Sementara itu Rasio efektivitas pendapatan terendah terjadi pada Kabupaten Batanghari dengan Rasio efektivitas pendapatan sebesar 95,52 persen dengan kategori cukup efektif. Rendahnya Rasio efektivitas pendapatan di Kabupaten Batanghari dikarenakan pada tahun 2018, 2019, 2020 dan tahun 2022 pendapatan daerahnya tidak mencapai target yang ditetapkan.

Selanjutnya untuk rata-rata perkembangan Rasio efektivitas pendapatan di kabupaten/kota tertinggi terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu sebesar 4,92 persen. Hal ini dikarenakan Pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah melakukan upaya untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan. Ini bisa termasuk perbaikan dalam pengumpulan pajak, pengurangan pemborosan, atau

penggunaan sumber daya yang lebih efektif. Sedangkan perkembangan Rasio efektivitas pendapatan di kabupaten/kota terendah terjadi di Kabupaten Batanghari yaitu sebesar -1,38 persen. Hal ini dikarenakan Kabupaten Batanghari sangat bergantung pada satu atau beberapa sektor ekonomi yang rentan terhadap fluktuasi pasar atau faktor eksternal lainnya, seperti pertanian atau industri yang belum berkembang, hal ini dapat menyebabkan pendapatan daerah menjadi tidak stabil dan efektivitas pendapatan menjadi rendah.

5.3 Perkembangan Rasio Efisiensi di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi

Untuk mengetahui perkembangan Rasio Efisiensi di kabupaten/kota Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.3 Perkembangan Rasio Efisiensi Kabupaten/Kota Provinsi Jambi Tahun 2017-2022 (Persen)

Kabupaten/Kota	Rasio Efisiensi						Rata-rata
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Kab. Kerinci	97,92	96,44	102,46	102,16	96,42	98,25	98,94
Perkembangan (%)	-	-1,51	6,24	-0,30	-5,62	1,89	0,14
Kab. Merangin	102,94	98,55	96,05	103,77	108,69	92,16	100,36
Perkembangan (%)	-	-4,27	-2,54	8,04	4,74	-15,20	-1,85
Kab. Sarolangun	93,96	90,47	107,63	105,74	95,57	98,23	98,60
Perkembangan (%)	-	-3,71	18,96	-1,75	-9,62	2,78	1,33
Kab. Batanghari	100,11	96,98	101,60	99,97	93,25	104,50	99,40
Perkembangan (%)	-	-3,13	4,77	-1,61	-6,72	12,06	1,07
Kab. Muaro Jambi	102,72	93,97	101,76	105,15	95,56	101,84	100,17
Perkembangan (%)	-	-8,52	8,30	3,33	-9,12	6,57	0,11
Kab. Tanjung Jabung Barat	96,87	103,66	99,42	104,06	90,21	104,37	99,76
Perkembangan (%)	-	7,00	-4,08	4,66	-13,32	15,70	1,99
Kab. Tanjung Jabung Timur	98,45	97,32	103,66	97,82	93,68	94,94	97,65
Perkembangan (%)	-	-1,15	6,51	-5,63	-4,23	1,34	-0,63
Kab. Tebo	95,35	95,13	96,76	94,12	98,16	113,90	98,90
Perkembangan (%)	-	-0,24	1,72	-2,73	4,29	16,03	3,82

Kabupaten/Kota	Rasio Efisiensi						Rata-rata
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Kab. Bungo	92,93	103,09	102,74	101,66	88,48	96,15	97,51
Perkembangan (%)	-	10,94	-0,34	-1,05	-12,96	8,67	1,05
Kota Jambi	99,71	97,15	97,75	102,83	105,29	97,25	100,01
Perkembangan (%)	-	-2,57	0,62	5,19	2,39	-7,63	-0,40
Kota Sungai Penuh	100,17	101,89	98,32	94,92	103,27	102,16	100,12
Perkembangan (%)	-	1,71	-3,51	-3,45	8,79	-1,08	0,49
Total	98,29	97,70	100,74	101,11	97,14	100,34	99,22
Perkembangan (%)	-	-0,60	3,12	0,37	-3,92	3,29	0,45

Sumber : Badan Pusat Statistik Jambi 2024

Berdasarkan tabel 5.3 dapat dilihat bahwa setiap wilayah memiliki Rasio Efisiensi yang berbeda-beda. Untuk rata-rata Rasio Efisiensi di kabupaten/kota Provinsi Jambi selama tahun 2017-2022 rata-rata sebesar 99,22 persen yang menunjukkan bahwa Rasio Efisiensi di kabupaten/kota Provinsi Jambi selama tahun 2017-2022 kategorinya adalah kurang efisien. Untuk perkembangan Rasio Efisiensi daerah di kabupaten/kota Provinsi Jambi selama tahun 2017-2022 mengalami perkembangan yang berfluktuasi dengan rata-rata Rasio Efisiensi sebesar 0,45 persen.

Rasio Efisiensi tertinggi yaitu di wilayah Kabupaten Merangin dengan Rasio Efisiensi sebesar 100,36 persen namun angka rasio ini masih pada kategori sangat tidak efisien. Hal ini dikarenakan pengeluaran belanja daerah Kabupaten Merangin tidak sesuai dengan pendapatan yang diterima dalam tahun 2017, 2020 dan tahun 2021 atau dengan istilah defisit anggaran. Sementara itu Rasio Efisiensi terendah terjadi pada Kabupaten Bungo dengan Rasio Efisiensi sebesar 97,51 persen dengan kategori kurang efisien. Hal ini dikarenakan kurangnya pengelolaan keuangan yang efektif dan

transparan oleh pemerintah daerah dapat menyebabkan pemborosan atau penggunaan dana yang tidak optimal.

Selanjutnya untuk rata-rata perkembangan Rasio Efisiensi di kabupaten/kota tertinggi terjadi di Kabupaten Tebo yaitu sebesar 3,82 persen. Hal ini dikarenakan Kabupaten Tebo memiliki sistem pengelolaan keuangan yang efisien, termasuk pengelolaan anggaran yang baik, pemantauan pengeluaran yang cermat, dan kontrol birokrasi yang ketat. Ini dapat membantu mencegah pemborosan dan penyalahgunaan dana, serta memastikan bahwa sumber daya publik digunakan secara optimal. Sedangkan perkembangan Rasio Efisiensi di kabupaten/kota terendah terjadi di Kabupaten Merangin yaitu sebesar -1,85 persen. Hal ini dikarenakan Kabupaten Merangin sangat bergantung pada satu atau dua sumber pendapatan utama yang rentan terhadap fluktuasi pasar atau faktor eksternal lainnya, seperti pajak dari sektor tertentu atau dana transfer, hal ini dapat menyebabkan ketidakstabilan pendapatan dan menurunkan rasio efisiensi.

5.4 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses dimana terjadi kenaikan Produk Nasional Bruto Riil suatu perekonomian riil atau pendapatan riil. Jadi suatu perekonomian dapat dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi output riil. Pertumbuhan ekonomi dihitung dengan perkembangan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 menurut lapangan usaha.

Tabel 5.4 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2017-2022 (Persen)

Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi (%)						Rata-Rata (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Kerinci	5,86	4,93	4,23	3,81	3,89	4,43	4,53
Merangin	5,39	4,93	4,25	0,78	5,24	5,72	4,39
Sarolangun	4,68	4,8	4,26	-0,25	6,61	6,73	4,47
Batang Hari	4,81	4,83	5,07	-0,43	4,85	12,27	5,23
Muaro Jambi	4,95	5,01	4,79	0,35	4,06	7,97	4,52
Tanjabtim	3,07	2,94	4,21	-3,44	0,14	0,57	1,25
Tanjabbar	4,48	6,77	5,01	-0,29	1,36	2,56	3,32
Tebo	5,58	4,98	4,76	-0,03	4,3	6,3	4,32
Bungo	5,68	4,65	4,19	-0,48	4,99	4,73	3,96
Kota Jambi	4,68	5,3	4,73	-4,24	4,08	5,36	3,32
Kota Sungai Penuh	6,02	4,88	5,01	-0,16	3,67	4,45	3,98
Provinsi Jambi	4,6	4,69	4,35	-0,51	3,69	5,13	3,66

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2024

Berdasarkan tabel 5.4 dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi selama periode tahun 2017 sampai tahun 2022 mengalami pertumbuhan yang berfluktuatif. Berdasarkan perkembangan pertahunnya, bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi mengalami fluktuasi dimana rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jambi sebesar 3,66 persen.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada Kabupaten Batanghari dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 5,23 persen. Tingginya rata-rata pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Batanghari karena Kabupaten Batanghari memiliki potensi sumber daya alam yang besar, seperti hasil pertanian, perkebunan, tambang, atau potensi pariwisata yang belum dimanfaatkan sepenuhnya, pertumbuhan ekonomi dapat

didorong oleh eksploitasi dan pengembangan potensi tersebut. Identifikasi dan pengembangan sektor ekonomi unggulan yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi, seperti sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan, atau pariwisata, dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan.

Sedangkan pertumbuhan ekonomi paling terendah tercatat pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur hanya sebesar 1,25 persen. Rendahnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dikarenakan potensi sumber daya alam di wilayah ini tidak bisa diandalkan sebab wilayah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih termasuk wilayah gambut sehingga tidak mendukung produksi di sector pertanian dan perkebunan, begitu juga dengan sector sekunder yang mana perusahaan tidak tertarik untuk melakukan investasi di wilayah ini. Keterbatasan infrastruktur, seperti jaringan transportasi yang buruk atau ketersediaan listrik yang tidak memadai, dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan produktivitas di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

5.5 Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Rasio efektivitas pendapatan dan Rasio Efisiensi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2017-2022

Bagian ini akan menjelaskan bagaimana pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Rasio efektivitas pendapatan dan Rasio Efisiensi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2017-2022 yang menggunakan perhitungan regresi data panel yaitu menggunakan data time series adalah data tahunan t yaitu tahun 2017-2022 dan cross section adalah Objek data yaitu meliputi 11 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jambi. Variabel bebas yang digunakan Rasio Kemandirian Daerah,

Rasio efektivitas pendapatan dan Rasio Efisiensi dan variabel terikatnya adalah Pertumbuhan Ekonomi

Chow Test (Uji Chow) Dilakukan untuk membandingkan/memilih model mana yang terbaik antara PLS dan FEM.

Tabel 5.5 Uji Chow untuk memilih antara model PLS dengan FEM

Redundant Fixed Effects Tests

Pool: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1.943516	(10,52)	0.0598
Cross-section Chi-square	20.958064	10	0.0214

Sumber: Data Diolah, Eviews 9 (2024)

Adapun hipotesis yang digunakan dalam pemilihan Uji *Chow* ini adalah:

- a. Jika $p\text{-value} < \alpha$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya model FEM lebih baik dibandingkan model PLS.
- b. Jika $p\text{-value} > \alpha$, maka H_1 ditolak dan H_0 diterima, artinya model PLS lebih baik dibandingkan model FEM.

Berdasarkan output Eviews tersebut menunjukkan bahwa baik F test maupun Chi-Square signifikan (Prob. 0,0214 dan 0,0214 lebih kecil dibandingkan alfa 0,05 persen), sehingga model ini hipotesis H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model FEM lebih baik dibandingkan model PLS. Sehingga pengujian berikutnya yaitu dengan membandingkan metode FEM atau REM dengan melakukan uji *hausman*. *Hausman Test* (Uji Hausman) dilakukan untuk membandingkan/memilih model mana yang terbaik antara FEM dan REM.

Tabel 5.6 Uji Hausman untuk memilih antara model FEM dengan REM

Correlated Random Effects - Hausman Test

Pool: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	8.362728	3	0.0391

Sumber: Data Diolah, Eviews 9 (2023)

Adapun hipotesis yang digunakan dalam pemilihan Uji Hausman ini adalah:

- a. Jika $p\text{-value} < \alpha$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya model FEM lebih baik dibandingkan model REM.
- b. Jika $p\text{-value} > \alpha$, maka H_1 ditolak dan H_0 diterima, artinya model REM lebih baik dibandingkan model FEM.

Berdasarkan output Eviews tersebut menunjukkan bahwa nilai statistic Chi-Square memiliki Prob lebih kecil dibandingkan alfa 0,05 persen ($0,0391 < 0,05$), sehingga hipotesis H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model FEM lebih baik dibandingkan REM. Berdasarkan hasil uji chow dan uji hausmann model yang sering muncul adalah model FEM sehingga tidak diperlukan lagi *uji lagrange multipliyer* dan penelitian ini akan menggunakan model FEM sebagai model dalam penelitian ini.

5.5.1 Estimasi Model FEM

a. Estimasi Koefisien Variable Model FEM

Hasil estimasi persamaan data panel tentang pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Rasio efektivitas pendapatan dan Rasio Efisiensi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.7 Hasil Estimasi *Fixed Effects Model* (FEM)

Dependent Variable: PE?
 Method: Pooled Least Squares
 Date: 03/04/24 Time: 17:59
 Sample: 2017 2022
 Included observations: 6
 Cross-sections included: 11
 Total pool (balanced) observations: 66

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-17.11332	9.302177	-1.839712	0.0715
RKM?	0.195850	0.230256	0.850573	0.3989
REFK?	0.137806	0.038482	3.581027	0.0008
REFI?	0.054600	0.069406	0.786666	0.4350
Fixed Effects (Cross)				
_KERINCI--C	1.353924			
_MERANGIN--C	0.854948			
_SAROLANGUN--C	1.090882			
_BARANGHARI--C	2.095793			
_MUAROJAMBI--C	0.928881			
_TANJABBAR--C	-2.224935			
_TANJABTIM--C	-2.164485			
_TEBO--C	0.476499			
_BUNGO--C	0.115119			
_KOTAJAMBI--C	-3.356765			
_SUNGAIPENUH--C	0.830139			
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.329775	Mean dependent var	3.933788	
Adjusted R-squared	0.162219	S.D. dependent var	2.617334	
S.E. of regression	2.395656	Akaike info criterion	4.771022	
Sum squared resid	298.4366	Schwarz criterion	5.235495	
Log likelihood	-143.4437	Hannan-Quinn criter.	4.954557	
F-statistic	1.968146	Durbin-Watson stat	1.803794	
Prob(F-statistic)	0.043053			

Sumber: Data Diolah, Eviews 9 (2024)

Berdasarkan hasil estimasi Rasio Kemandirian Daerah tabel 5.7 tersebut dapat diketahui penjelasan masing-masing variabel dalam penelitian yaitu pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Rasio efektivitas pendapatan dan Rasio Efisiensi Terhadap

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2017-2022 dapat dijelaskan persamaan model sebagai berikut:

$$PE_{it} = -17,11332 + 0,195850RKM_{it} + 0,137806REFK_{it} + 0,054600REFI_{it} + e$$

Berdasarkan Persamaan Model diatas dapat dijelaskan hasil estimasi terhadap *Fixed effect* adalah jika terjadi perubahan antara Rasio Kemandirian Daerah, Rasio efektivitas pendapatan dan Rasio Efisiensi baik antar wilayah maupun antar waktu, maka nilai konstanta sebesar -17,11332 Hal ini berarti apabila Rasio Kemandirian Daerah, Rasio efektivitas pendapatan dan Rasio Efisiensi tetap maka Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi Tahun 2017-2022 sebesar -17,11332 persen.

1. Nilai koefisien Rasio Kemandirian Daerah sebesar 0,195850, namun koefisiennya tidak dapat dijelaskan karena variabel ini tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan Kabupaten/kota di Provinsi Jambi sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat atau sumber pendapatan lain yang berasal dari luar daerah, seperti hasil ekspor komoditas atau proyek-proyek nasional, maka rasio kemandirian daerah tidak memberikan gambaran yang akurat tentang potensi pertumbuhan ekonomi setempat.
2. Nilai koefisien Rasio efektivitas pendapatan sebesar 0,137806 dan variable tetap atau konstan maka dapat diartikan ketika Rasio efektivitas pendapatan meningkat satu persen maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi mengalami peningkatan sebesar 0,137806 persen. Hal ini dikarenakan Rasio efektivitas pendapatan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jambi berada pada kategori sangat efektif.

3. Nilai koefisien Rasio Efisiensi sebesar 0,054600, namun koefisiennya tidak dapat dijelaskan karena variabel ini tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan Kabupaten/kota di Provinsi Jambi sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat atau sumber pendapatan lain sehingga efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah mungkin tidak memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi setempat.

b. Estimasi Koefisien Model FEM Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

Dari hasil estimasi dengan menggunakan *Fixed Effect Model* dapat dijelaskan bahwa masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jambi memiliki nilai intersep yang berbeda-beda. Individual *Fixed effect* dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 5.8 Fixed Effect Estimasi Model FEM

Kabupaten/Kota	Fixed Effect
Kerinci	1.353924
Merangin	0.854948
Sarolangun	1.090882
Batanghari	2.095793
Muaro Jambi	0.928881
Tanjung Jabung Timur	-2.224935
Tanjung Jabung Barat	-2.164485
Tebo	0.476499
Bungo	0.115119
Kota Jambi	-3.356765
Kota Sungai Penuh	0.830139

Sumber: Data Diolah, Eviews 9 (2024)

5.2.2 Uji Hipotesis

1. Uji R²

Berdasarkan hasil estimasi Rasio Kemandirian Daerah model FEM didapatkan bahwa nilai R-Squared adalah sebesar 0,329775 artinya bahwa variabel Rasio Kemandirian Daerah, Rasio efektivitas pendapatan dan Rasio Efisiensi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jambi sebesar 32,98 persen, sementara 67,02 persen dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

2. Uji F Statistik

Berdasarkan hasil estimasi Rasio Kemandirian Daerah model FEM didapatkan bahwa nilai Prob (f Statistik) $0,043053 < 0,05$, maka berarti H_0 ditolak dan menerima H_a , yang artinya uji secara bersama sama menunjukkan Rasio Kemandirian Daerah, Rasio efektivitas pendapatan dan Rasio Efisiensi secara Bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

3. Uji t Statistik

Untuk menguji signifikansi pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Rasio efektivitas pendapatan dan Rasio Efisiensi terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jambi secara parsial maka digunakan uji t statistik. Uji t Statistik berguna untuk melihat besarnya pengaruh masing-masing variabel Independen terhadap variabel dependen secara parsial. Tingkat kepercayaan 95 persen probabilitas 0,05 yang dapat di lihat di tabel berikut ini:

Tabel 5.9. Nilai t Statistik Metode FEM

Variabel	Prob.	Keterangan
Rasio Kemandirian Daerah	0.3989	Tidak Signifikan
Rasio efektivitas pendapatan	0.0008	Signifikan
Rasio Efisiensi	0.4350	Tidak Signifikan

Sumber: Data Diolah, Eviews 09 (2023)

Berdasarkan tabel 5.9 dapat diterangkan hasil uji t statistik sebagai berikut:

1. Jika dilihat dari *Prob* sebesar 0,3989 karena $Prob > 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Ini menunjukkan bahwa Rasio Kemandirian Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jambi.
2. Jika dilihat dari *Prob* sebesar 0,0008 karena $Prob < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Ini menunjukkan bahwa Rasio efektivitas pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jambi.
3. Jika dilihat dari *Prob* sebesar 0,4350 karena $Prob > 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Ini menunjukkan bahwa Rasio Efisiensi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

5.5.3 Analisis Ekonomi

1. Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil penelitian bahwa bahwa Rasio Kemandirian Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Hasil ini sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Kumpangpune (2019) yang mengatakan Rasio Kemandirian Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hal ini menunjukkan Rasio Kemandirian Daerah di

kabupaten/kota Provinsi Jambi belum mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

Berdasarkan teori federalisme fiskal dalam Halim (2012), penerapan desentralisasi fiskal pada suatu daerah yang daerah tersebut di harapkan mampu untuk membiayai sendiri seluruh kegiatan pemerintah. Tidak hanya itu dengan adanya desentralisasi fiskal pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik lebih demokratis. Jika daerah tersebut tidak mampu untuk menerapkan desentralisasi fiskal yaitu berupa pelimpahan wewenang dari pusat maka daerah tersebut akan tertinggal dan menyebabkan kemunduran dalam pembangunan ekonomi. Menurut Mahmudi (2015) semakin tinggi Rasio Kemandirian Daerah tersebut maka semakin besar keleluasaan pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang manfaatnya yaitu dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Tidak berpengaruhnya Rasio Kemandirian Daerah di kabupaten/kota Provinsi Jambi terhadap pertumbuhan ekonomi dikarenakan realisasi Rasio Kemandirian Daerah seluruh kabupaten/kota Provinsi Jambi masih sangat rendah dengan rata-rata hanya sebesar 8,81 persen sehingga sisanya 91,19 persen bergantung terhadap dana transfer dari pusat, sehingga menunjukkan kabupaten/kota Provinsi Jambi belum mandiri dalam membiayai pengeluaran daerahnya.

Kabupaten/kota di Provinsi Jambi sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat atau sumber pendapatan lain yang berasal dari luar daerah, seperti hasil ekspor komoditas atau proyek-proyek nasional, maka rasio kemandirian daerah

mungkin tidak memberikan gambaran yang akurat tentang potensi pertumbuhan ekonomi setempat.

Selain itu perkembangan rasio kemandirian daerah di kabupaten/kota Provinsi Jambi juga menunjukkan trend negatif selama tahun 2017-2022 yaitu -0,51 persen pertahunnya. Sebaliknya agar pertumbuhan ekonomi meningkat maka dibutuhkan anggaran yang besar untuk dialokasikan ke program pemerintah yang dapat menyentuh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun karena rasio kemandirian daerah rendah dan bahkan menunjukkan perkembangan yang negatif oleh sebab itu Rasio Kemandirian Daerah tidak cukup untuk berkontribusi untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Jambi.

2. Pengaruh Rasio efektivitas pendapatan terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil penelitian bahwa bahwa Rasio efektivitas pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Hasil ini sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Hera (2021) yang mengatakan bahwa adanya hubungan positif antara Rasio efektivitas pendapatan terhadap kemiskinan. Hal ini menunjukkan jika Rasio efektivitas pendapatan meningkat maka pertumbuhan ekonomi juga dapat meningkat.

Berdasarkan teori federalisme fiskal dalam Halim (2012), penerapan desentralisasi fiskal pada suatu daerah yang daerah agar daerah tersebut menjadi lebih baik. Pemerintah daerah dituntut untuk dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan juga dapat menggali potensi penerimaan secara mandiri. Dalam membangun dan mengembangkan perekonomian pemerintah daerah mempunyai hak dan kewajiban

dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan keefektifan penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Mahmudi (2015) derajat keberhasilan suatu daerah dalam mengelola anggaran maupun mengelola potensi yang terdapat di daerah tersebut dapat dikaitkan dengan perkembangan perekonomian di daerah itu, semakin berhasil dalam mencapai target yang diinginkan atau semakin efektif, maka seharusnya perkembangan perekonomian akan meningkat. Hal ini akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat

Berpengaruhnya Rasio efektivitas pendapatan terhadap pertumbuhan ekonomi dikarenakan Rasio efektivitas pendapatan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jambi berada pada kategori sangat efektif dengan rata-rata rasio sebesar 100,90 persen. Target pendapatan daerah setiap tahunnya terus meningkat dengan rata-rata target pendapatan daerah dalam periode tahun 2017-2022 sebesar Rp. 1.248.709 juta dan realisasinya mampu melebihi dari target yang ditetapkan. Sehingga peningkatan tersebut akan memberikan pemerintah kemampuan untuk membiayai seluruh anggaran yang dibutuhkan yang ada dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Rasio efektivitas pendapatan yang tinggi mengindikasikan bahwa pemerintah daerah efisien dalam mengelola pendapatan yang diterima, seperti pajak dan penerimaan lainnya. Dengan pengelolaan yang baik, pemerintah dapat memiliki lebih banyak dana untuk menginvestasikan dalam pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor lain yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

Rasio efektivitas pendapatan yang tinggi juga dapat mencerminkan keseimbangan anggaran yang sehat, di mana pemerintah daerah memiliki lebih banyak

sumber daya untuk menanggung beban utang yang lebih rendah. Ini dapat menciptakan kestabilan fiskal yang penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

3. Pengaruh Rasio Efisiensi terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil penelitian bahwa bahwa Rasio Efisiensi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Hasil ini sependapat dengan Hera (2021) yang mengatakan ketika Rasio Efisiensi tidak berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi.

Tidak Berpengaruhnya Rasio Efisiensi terhadap pertumbuhan ekonomi dikarenakan belanja daerah yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan tidak dilakukan secara efisien. Rata-rata rasio efisiensi sebesar 99,22 persen dan bahkan terdapat beberapa wilayah yang memiliki rasio efisiensi lebih dari 100 persen yaitu Kabupaten Merangin sebesar 100,36 persen, Kabupaten Muaro Jambi sebesar 100,17 persen, Kota Jambi 100,01 persen dan Kota Sungai Penuh 100,12 persen. Artinya wilayah ini memiliki defisit anggaran dalam menggunakan belanja daerahnya. Hal ini berdampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi. Seharusnya belanja daerah yang besar dapat menghasilkan pendapatan daerah yang besar pula, khususnya pada pendapatan asli daerah. Kabupaten/kota di Provinsi Jambi sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat atau sumber pendapatan lain yang berasal dari luar daerah, seperti hasil ekspor komoditas atau proyek-proyek nasional, maka efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah mungkin tidak memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi setempat.

5.6 Implikasi Kebijakan

Implikasi kebijakan dari pengaruh rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas pendapatan, dan rasio efisiensi terhadap pertumbuhan ekonomi memberikan panduan bagi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan mereka secara lebih efektif dan efisien untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Berikut adalah rincian dari implikasi kebijakan yang dapat diambil berdasarkan masing-masing rasio:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Dari hasil analisis rasio kemandirian daerah adalah tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang disebabkan pemerintah telah melakukan upaya peningkatan pajak dan retribusi daerah namun sistem administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah belum optimal. Hal ini sesuai dengan implikasi kebijakan pemerintah, maka baiknya pemerintah dapat melakukan beberapa hal berikut ini :

- a. pemerintah dapat melakukan optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah dengan memperbaiki sistem administrasi pajak dan retribusi agar lebih efisien dan transparan
- b. Pemerintah dapat meningkatkan sumber-sumber PAD melalui diversifikasi ekonomi lokal, seperti pengembangan sektor pariwisata, industri kreatif, dan jasa. Diversifikasi ekonomi memungkinkan pemerintah daerah untuk mengurangi ketergantungan pada sektor ekonomi tertentu dan menciptakan sumber pendapatan yang lebih stabil.

- c. Pemerintah dapat melakukan pengawasan dan audit secara rutin terhadap kinerja pengumpulan pendapatan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kebocoran pendapatan.

2. Rasio Efektivitas Pendapatan

Dari hasil analisis rasio efektivitas pendapatan daerah adalah t signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang disebabkan pemerintah menetapkan target pendapatan yang realistis dan berbasis data yang akurat untuk memastikan bahwa target tersebut dapat dicapai. Hal ini sesuai dengan implikasi kebijakan pemerintah, untuk mempertahankan pengaruh tersebut baiknya pemerintah dapat melakukan beberapa hal berikut ini :

- a. Pemerintah daerah dapat mencari sumber pendapatan alternatif seperti kerjasama dengan sektor swasta, pendapatan dari aset-aset milik daerah, atau program-program investasi yang menghasilkan pendapatan.
- b. Pemerintah daerah perlu memiliki sistem pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan efisien. Ini termasuk penyusunan anggaran yang realistis, pemantauan pengeluaran secara berkala, dan evaluasi kinerja keuangan secara rutin.

3. Rasio Efisiensi

Dari hasil analisis rasio efisiensi adalah tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang disebabkan pemerintah telah melakukan perencanaan anggaran agar keuangan daerah dapat lebih efisien, namun perencanaan anggaran tersebut belum maksimal. Hal ini sesuai dengan

implikasi kebijakan pemerintah, maka baiknya pemerintah dapat melakukan beberapa hal berikut ini :

- a. Pemerintah daerah harus melakukan perencanaan anggaran yang lebih cermat dan berbasis kinerja untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
- b. Kemudian melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap semua program dan kegiatan untuk mengidentifikasi area-area di mana penghematan bisa dilakukan tanpa mengorbankan kualitas layanan.
- c. Diperlukan upaya peningkatan PAD agar rasio nya terhadap belanja daerah lebih efisien, yaitu dengan diversifikasi sumber pendapatan dengan mencari peluang-peluang baru, seperti kemitraan dengan sektor swasta, pengelolaan aset daerah, atau pengembangan sektor pariwisata dan industri kreatif.

Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pemerintah daerah harus mengadopsi kebijakan yang meningkatkan kemandirian keuangan, efektivitas pendapatan, dan efisiensi pengeluaran. Upaya-upaya tersebut meliputi diversifikasi sumber pendapatan, perbaikan sistem pengumpulan pendapatan, dan pengelolaan anggaran yang efisien. Dengan demikian, daerah dapat mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya untuk mendorong pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.